



AYO
BANGUN
NTT



LKIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Periode
2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. LKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 – 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan secara baik dan benar (*good governance*), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga menuntut kami untuk bekerja lebih keras dan fokus dari periode sebelumnya, terutama dalam menghadapi kendala dan masalah yang selalu dinamis setiap saat.

Dalam LKIP Tahun 2025 ini disampaikan tentang RENSTRA dan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2025, yang di dalamnya diuraikan tentang:

1. Arah kebijakan, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Tujuan, sasaran strategis dan indikator organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran; dan
3. Evaluasi kinerja, analisis pencapaian kinerja serta tingkat keberhasilan kinerja.

Dengan uraian-uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Februari 2026
 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

 Sulastri H. Rasyid, S.Pi, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19781019 199903 2 004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Ahli Pertama-Pranata Komputer	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum dan Potensi Kelautan Perikanan	1
1.3 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	4
1.4 Jumlah Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan	8
1.5 Sumber Daya Aset.....	8
1.6 Isu-Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2023.....	10
a. Visi dan Misi	10
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	11
c. Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.2 Program/ Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	14
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	19
2.4 Perjanjian Kinerja	19
a. Perjanjian Kinerja Utama	20
b. Perjanjian Kinerja Program (outcome).....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
a. Kerangka Pengukuran Kinerja	22
b. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja.....	24
c. Pengukuran Indikator Kinerja.....	24
d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.2 Realisasi Anggaran	38
a. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	38
b. Realisasi Pendapatan Tahun 2025	42
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam menjabarkan tugas dan fungsi kewenangan pengelolaan bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan suatu strategi perencanaan yang sistematis, yang dalam hal ini telah dirumuskan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA 2024 – 2026).

Tujuan dari pembangunan Kelautan dan Perikanan jangka 2 (Dua) Tahun (2024 – 2026) adalah MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL. Berdasarkan tujuan di atas pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran strategis Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabaran tujuan secara kuantitatif, yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dengan target indikator kinerja Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah sebesar 1%;
2. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan dengan target indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan senilai 102 dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan senilai 102;
3. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan dengan target indikator kinerja Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan sebesar 58 kg/kapita/tahun;
4. Perairan Laut yang bebas IUU Fishing dengan target indikator Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing) sebesar 3,45%;
5. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola dengan target indikator Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola 790.420 Ha.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2025 mengelola anggaran yang difasilitasi dari APBD sebesar Rp. 55.958.303.600,- (**Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Tiga Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah**) dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp. 22.170.815.487,- (**Dua Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah**) dengan realisasi keuangan TA. 2025 sebesar Rp. 18.913.798.556,- (**Delapan belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah**) atau mencapai persentase 85,31% (**Delapan Puluh Lima Koma Tiga Puluh Satu Persen**).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengisyaratkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Akuntabilitas capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang Tahun 2025 disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan sarana keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintahan dalam mengkomunikasikan kinerja penyelenggaraan pembangunan, sekaligus alat penilaian dan pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih yang bertujuan untuk:

- a. Mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program kegiatan dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi;
- b. Pengambilan keputusan kearah perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
- c. Perbaikan dalam perencanaan demi terwujudnya visi dan misi dari organisasi.

1.2. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI KELAUTAN PERIKANAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai 5.934,62 km dan luas laut +200.000 km² serta memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang menawan dan perlu dieksplor serta dilestarikan. Kekayaan bahari seharusnya mampu menjadi penggerak perekonomian dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di 8⁰ – 12⁰ LS dan 118⁰ – 125⁰ BT dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 609 buah yang terdiri atas 432 pulau bernama dan 44 pulau yang berpenghuni. Terdapat 808 desa pantai dengan jumlah penduduk di daerah pesisir sebanyak ±1.300.000 jiwa. Hasil perhitungan Angka Konsumsi Ikan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan angka 51,09 kg/kapita/tahun. Kondisi ini didukung oleh pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan serta kondisi potensi yang ada.

Upaya untuk membangun dinamika pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan didukung dengan peluang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang terdistribusi pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang masuk dalam wilayah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing WPP-NRI 573, WPP-NRI 713, WPP-NRI 714 dan berbatasan dengan wilayah negara Timor Leste dan Australia yang secara keseluruhan pada ketiga WPP tersebut Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 2.756.522 ton dengan nilai pemanfaatan sebesar 724.965,286 ton atau sebesar 26,30% (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022).

Tabel 1.1 Potensi Sumberdaya Ikan pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan

No	Jenis Ikan	Potensi Sumber Daya Ikan (Ton)		
		WPPNRI 573	WPPNRI 713	WPPNRI 714
1	Ikan Pelagis Kecil	624,366	284,302	222,881
2	Ikan Pelagis Besar	354,215	162,506	370,653
3	Ikan Demersal	299,600	374,500	292,000
4	Ikan Karang	23,725	167,403	121,326
5	Udang Penaeid	8,514	56,835	6,472
6	Lobster	1,563	765	724
7	Kepiting	585	6,213	1,758
8	Rajungan	3,750	9,253	4,705
9	Cumi-Cumi	22,124	11,370	13,460
Total		1,338,442	1,073,147	1,033,979

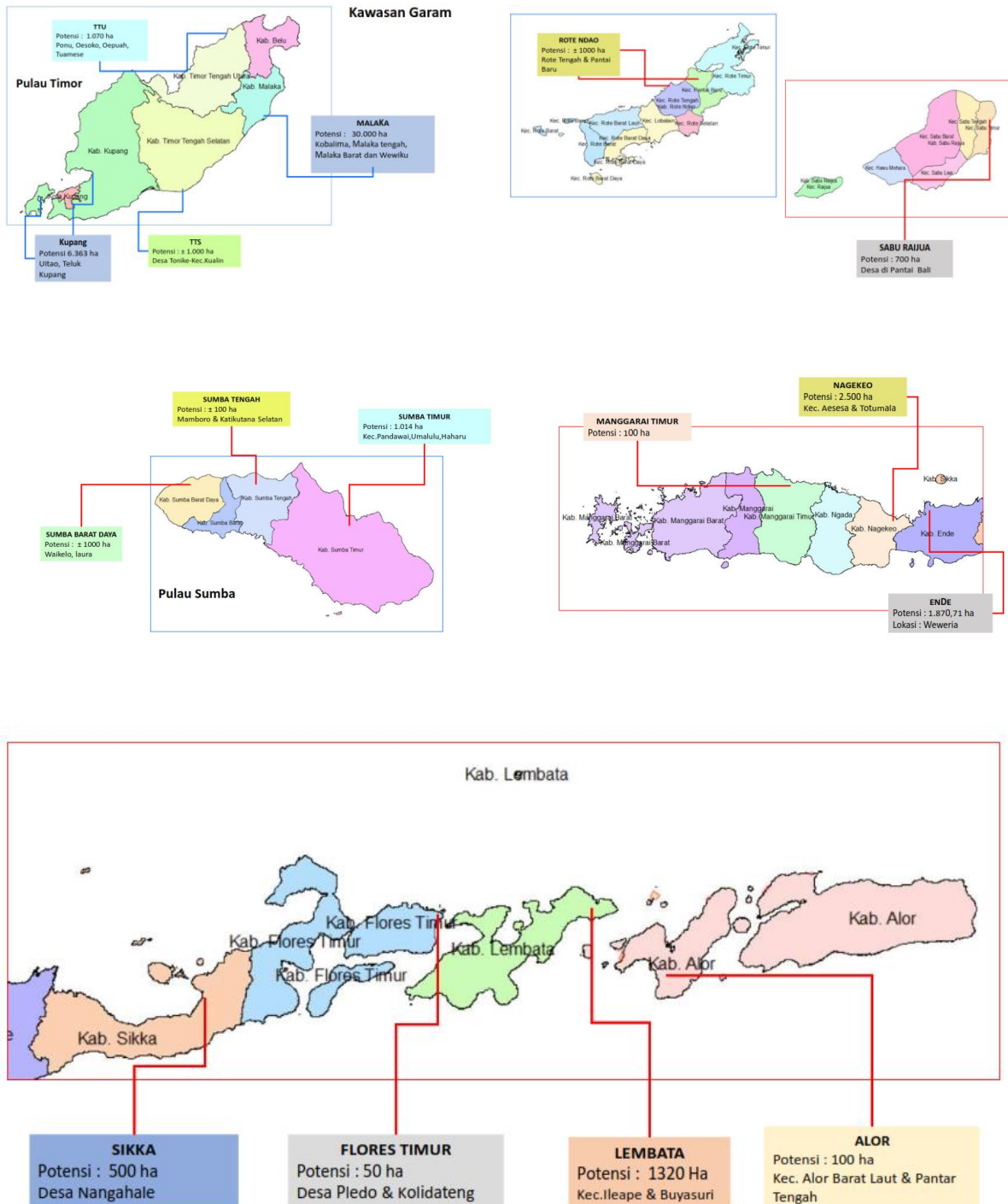
Sumber: KepMen KP Nomor 19 Tahun 2022

Selain potensi perikanan tangkap, perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk pengembangan perikanan budidaya, sesuai dengan lingkungan strategis dan potensi sumber daya lahan yang tersedia. Luas lahan budidaya laut yang tersedia mencapai 53.727 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 22,6% atau seluas 12.150 Ha. Potensi budidaya air payau seluas 35.455 Ha dengan tingkat pemanfaatan sebesar 4,3% atau seluas 1.510 Ha. Sedangkan luas lahan untuk budidaya air tawar mencapai 51.870 Ha tetapi tingkat pemanfaatan baru mencapai 1,7% atau seluas 910 Ha.

Potensi target konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi terumbu karang, lamun, mangrove, mamalia laut, ikan ekonomis penting, penyu dan hiu tikus. Persentase zona inti kawasan melindungi target konservasi sebesar 18%. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang menjadi

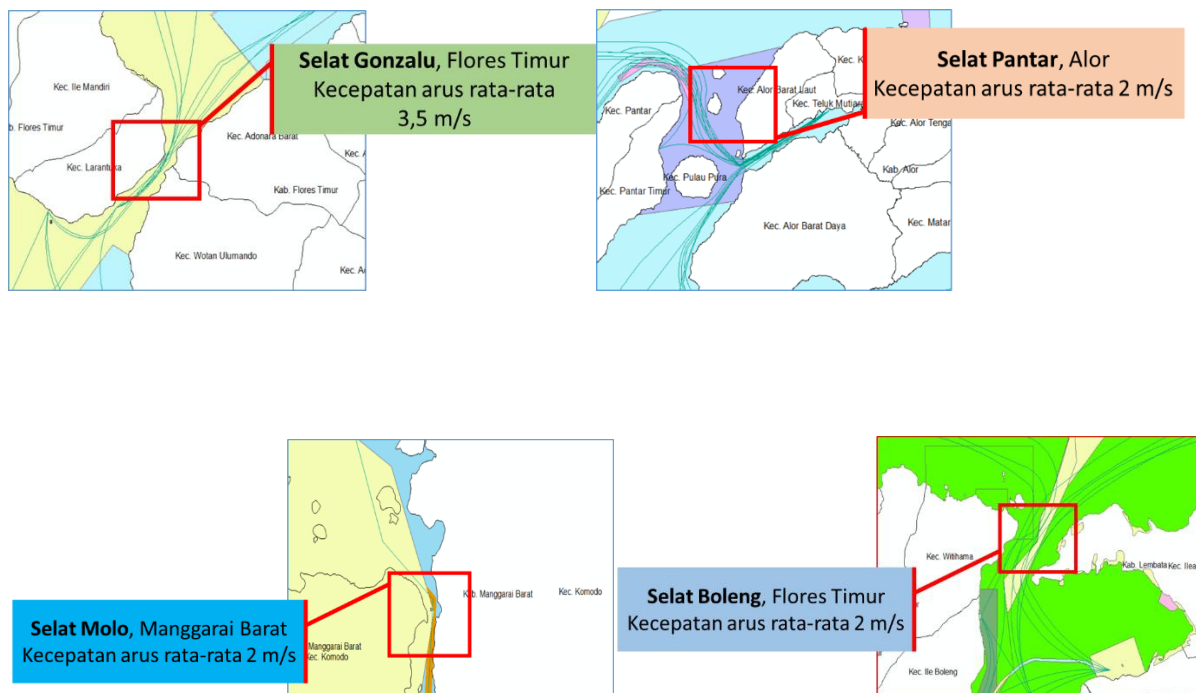
kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 4 kawasan yaitu Taman Perairan Kepulauan Alor dan Sekitarnya, KKPD Flores Timur, KKPD Sikka, KKPD Lembata.

Potensi lainnya yang dapat dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah industri garam. Potensi kawasan garam yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota tergambar dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Potensi Kawasan Garam di wilayah Nusa Tenggara Timur

Salah satu kebijakan dalam pembangunan sektor kelautan adalah pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama yaitu arus laut, gelombang laut dan temperatur laut. Lokasi potensial bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonzalu, Selat Boleng dan Selat Molo.



Gambar 1.2 Potensi Energi Baru Terbarukan di Nusa Tenggara Timur

1.3. SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ialah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian:
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya;
 2. Bidang Perikanan Tangkap;
 3. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD; dan
- f. Cabang Dinas;

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang berada di Kalabahi Kabupaten Alor merupakan UPTD di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 yakni melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (Dua Belas) mil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. Pembinaan dan pengembangan program pengelolaan kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. Pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan kawasan konservasi taman perairan kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

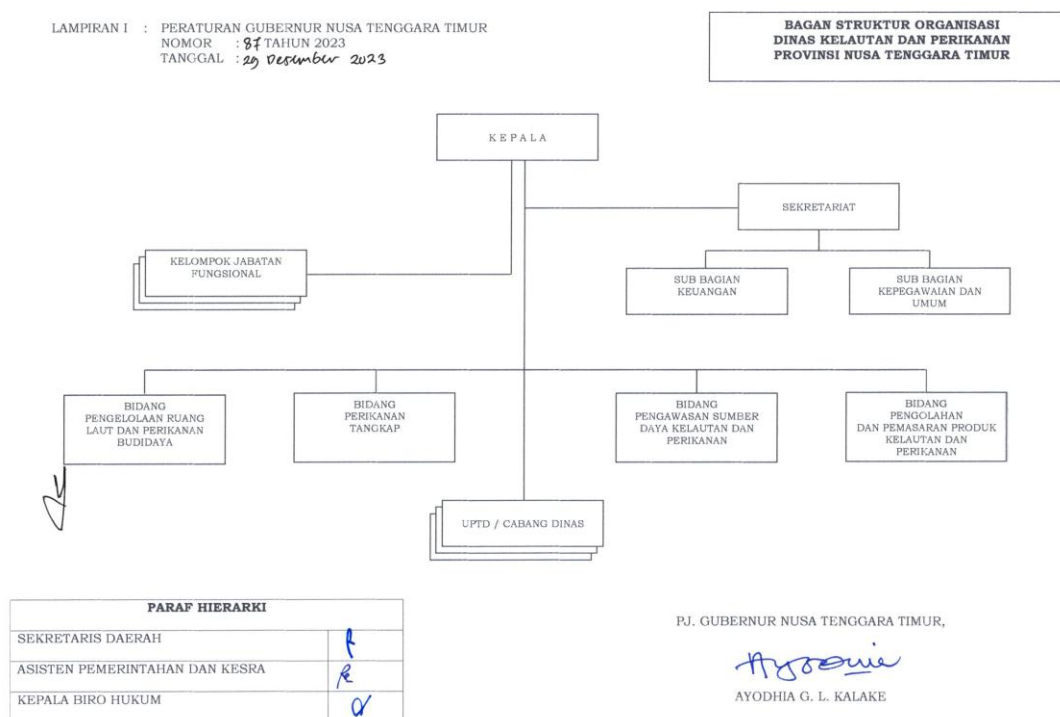
Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di wilayah kerjanya, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, data dan evaluasi, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;
- g. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;
- h. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan kelautan dan pengelolaan perikanan di wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari:

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah I, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka di Atambua.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah II, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sikka di Larantuka.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah III, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Ende.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah IV, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah V, Kelas A, meliputi wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tergambar dibawah ini.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

1.4. JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan Per 08 Januari 2026 sebanyak 210 orang yang terdiri dari 137 Laki-Laki dan 73 Perempuan. Berikut ini adalah data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S3 (Doktor)	0
2.	S2 (Pasca Sarjana)	10
3.	S1 (Sarjana)	113
4.	D-IV	8
4.	Sarmud/Diploma III	7
5.	SLTA/Sederajat	64
6.	SMP/Sederajat	7
7.	SD/SR	1
TOTAL		210

1.5. SUMBER DAYA ASET

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dalam waktu tahun 2013 – 2024 telah memiliki aset-aset sebagai berikut:

- Tanah seluas 618.487 m² yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota dengan nilai sebesar Rp 86.652.207.019,31,-;
- Gedung dan Bangunan sejumlah 135 unit dengan nilai sebesar Rp 35.378.812.532,-;
- Kendaraan roda 6 berjumlah 1 unit;
- Kendaraan roda 4 berjumlah 16 unit dengan rincian 9 unit kendaraan di Kantor Dinas dan 7 unit di masing-masing Cabang Dinas;
- Kendaraan roda 3 berjumlah 3 unit;
- Kendaraan roda 2 berjumlah 58 unit yang tersebar di Kantor Dinas sejumlah 32 unit dan sisanya di Cabang Dinas.

1.6. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan

menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness and Growth). Berbagai permasalahan/isu tadi dibobot dengan melihat seberapa mendesak isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu tersebut, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar kemungkinannya bahwa isu tersebut akan berkembang menjadi isu yang lebih besar dan bersifat membahayakan bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani.

Tabel 1.3 Analisis USG Permasalahan Utama Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Permasalahan	Nilai Skala Bobot (1-5)			Total Skor
		Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	5	5	5	15
2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	4	4	5	13
3	Kerusakan wilayah perairan	4	4	5	13
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	4	5	4	13
5	Tingginya angka stunting di NTT	5	5	5	15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024-2026

a. Tugas dan Fungsi

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2024 – 2026 disusun dengan merujuk pada Periode ke 4 RPJPD Provinsi NTT 2005-2025, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi NTT. Penyerasian ini diperlukan agar usaha yang dilakukan melalui perencanaan di dalam Renstra dapat saling bersinergi secara efektif dan efisien dengan perencanaan tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta indikator yang digunakan sebagai alat ukur yang saling melengkapi.

Prioritas kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2019–2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan IPTEK yang terus meningkat melalui terobosan Revolusi Industri 4.0. Pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT, prioritas yang termuat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat di bawah slogan **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Analisis Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir	Pemasaran masih didominasi oleh penjualan domestik sehingga harga jual ikan masih relatif rendah	Masih rendahnya investasi (<i>buyer</i>) dibidang ekspor produk perikanan

2	Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan	Masih rendahnya SDM dan belum masuknya teknologi terapan tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan	Melakukan pembinaan dan <i>pilot project</i> untuk teknologi tepat guna di bidang penangkapan dan budidaya ikan
3	Kerusakan wilayah perairan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan belum optimalnya upaya pengawasan	Belum optimalnya sosialisasi tentang kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan terbatasnya sarpras pengawasan
4	Belum optimalnya pemanfaatan perairan untuk budidaya rumput laut	Belum terpenuhinya penyediaan bibit unggul rumput laut	Terbatasnya kebun bibit unggul rumput laut yang diperbanyak melalui seleksi varietas dan kultur jaringan
5	Rendahnya angka konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi untuk penanganan stunting di NTT	Masih rendahnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) di kalangan masyarakat NTT	Masih belum terjangkaunya harga ikan dan distribusi ikan di daerah pelosok dan kurangnya sosialisasi GEMARIKAN di Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, adapun yang menjadi permasalahan pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir; masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan; kerusakan wilayah perairan; belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut; dan rendahnya angka konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan gizi untuk penanganan stunting di NTT.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2024 dan 2025 yaitu sebanyak 2 (dua) rumusan:

1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial; dan
2. Mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari 2 (dua) tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu:

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB;
2. Meningkatnya PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
3. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan;
4. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan;
5. Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan
7. Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing;

Adapun rincian tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Analisis Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	Meningkatnya kontribusi kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)
	Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah (%)
	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sektor perikanan
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan
	Meningkatnya status pangan berbasis perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan (kg/kapita/tahun)
Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate (Jenis)
	Perairan Laut yang bebas IUU Fishing	Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing) (%)
	Kawasan Konservasi perairan Daerah yang terkelola	Cakupan luas kawasan perairan daerah yang dikelola (Ha)

c. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Pembangunan kelautan dan perikanan di Nusa Tenggara Timur akan dipengaruhi faktor sumber daya seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia serta sumberdaya lainnya, termasuk sarana dan prasarana pendukung.

Pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga akan dipengaruhi oleh faktor politis berupa arahan kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Faktor arahan kebijakan tersebut akan menentukan pola, bentuk dan mekanisme dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat volume produksi/ pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, ketersediaan dukungan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta berbagai aspek lainnya yang terkait.

Penjelasan lebih lanjut tersaji dalam tabel di bawah ini tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu 2024 – 2026.

Tabel 2.3 Analisis Strategi dan Arah Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi sumberdaya perikanan dalam rangka peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap 1.2. Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi
2. Restrukturisasi armada penangkapan ikan	2.1. Perijinan perikanan tangkap
3. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.1. Peningkatan produktifitas budidaya rumput laut 3.2. Peningkatan produktifitas budidaya ikan 3.3. Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya
4. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Teknologi	4.1. Bimbingan Teknis dan Pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya 4.2. Diversifikasi produk pasca panen 4.3. Penyediaan Asuransi bagi nelayan dan pembudidaya

Sasaran: Meningkatnya angka konsumsi ikan	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Distribusi dan Pengolahan produk hasil Perikanan tangkap dan Budidaya	1.1. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) 1.2. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 1.3. Pengujian mutu produk hasil perikanan 1.4. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) 1.5. Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP)

Sasaran: Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Menghitung dan memetakan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari	1.1. Daya dukung daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil 1.2. Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove 1.3. Ijin lokasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil
2. Melakukan penetapan pengelolaan kawasan konservasi	2.1. Pengelolaan kawasan konservasi

Sasaran: Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Optimalisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan guna menurunkan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported Fishing)	1.1. Peningkatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan 1.2. Pembinaan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan

2.2. PROGRAM/ KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kebijakan pembangunan dijabarkan kembali pada suatu program yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program	Kegiatan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program	Kegiatan
	1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8. Fasilitasi Keprotokolan
2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 3.2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 3.3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 3.4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3.5. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 4.3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 4.4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 5.2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan diatas, maka selanjutnya dijabarkan kedalam masing-masing Sub Kegiatan beserta anggaran pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.5 Penjabaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.941.238.138
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.392.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.200.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.192.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.305.826.426
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.305.826.426
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	693.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	693.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.948.032
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.015.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.278.600
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000
	Penyediaan Bahan/Material	23.967.932
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.750.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.836.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.455.000
	Pengadaan Mebel	500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.955.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.124.337.680
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.332.700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	839.273.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.262.731.380
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.585.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.215.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.590.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.780.000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	10.582.000
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	10.582.000
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.000.000
	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.062.500

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.500.000
	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	5.019.500
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	939.671.049
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	6.500.000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	6.500.000
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	500.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	11.500.000
	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT 30	11.500.000
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas	14.780.400
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	500.000
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	906.390.649
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	906.390.649
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	47.400.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.500.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1.500.000
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja	10.000.000
	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	10.000.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	5.400.000
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.500.000
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.900.000
	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	30.500.000
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air	30.500.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU (Rp)
	Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
5.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	129.977.500
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	127.707.800
	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	1.500.000
	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.200.000
	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	29.505.000
	Perawatan Kapal Pengawas	70.270.800
	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	3.200.000
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	1.900.000
	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	8.800.000
	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	9.332.000
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	2.269.700
	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	2.269.700
6.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.101.946.800
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.101.946.800
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.100.000.000
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.946.800

Sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, maka bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi program prioritas yang difasilitasi dana APBN yang terdiri dari 6 (enam) program Tugas Pembantuan dan 1 (satu) program Dekonsentrasi dengan total anggaran murni sebesar Rp. 1.598.074.000,- akan tetapi seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran APBN berubah menjadi Rp. 17.000.000,-.

Tabel 2.6 Penjabaran Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Pagu Anggaran Tahun 2025

No.	Kode/ Program/ Kegiatan		Pagu Awal	Menjadi
1.	690948	SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (01) TP	303.000.000	-
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	303.000.000	-
2.	249169	SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (03)TP	482.678.000	17.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	482.678.000	17.000.000
3.	249170	SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (04)TP	130.321.000	-
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	130.321.000	-
4.	690993	SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (05)TP	158.320.000	-
		Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	158.320.000	-
5.	691031	SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (06)TP	143.755.000	-
		Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	143.755.000	-
6.	691069	SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (07)TP	290.000.000	-
		Program Pengelolaan Ruang Laut	290.000.000	-
7.	249086	SATKER DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT (05)DK	90.000.000	-
		Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90.000.000	-

2.3.RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berisikan program/ kegiatan tahunan dan anggaran pelaksanaan program/ kegiatan tersebut, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Tahun 2024-2026. Untuk Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan Dinas ditetapkan capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Menurut PERMENPAN-RB Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sebagai berikut:

2.4.1. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Gubernur) dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 2024 - 2026. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis. Untuk Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator

sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Penjabaran Indikator Kinerja, Sasaran Strategis, Target dan Formula Indikator Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Indikator
1.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	1,1%	$\frac{\text{Total PAD PD}}{\text{Total PAD Provinsi}} \times 100$
2.	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar nelayan (NTN) perikanan	102	Sumber data https://portaldata.kkp.go.id/
		Nilai tukar pembudidaya Ikan (NTPi)	102	Sumber data https://portaldata.kkp.go.id/
3.	Meningkatnya status pangan berbasis perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	58	https://portaldata.kkp.go.id/
4.	kawasan konservasi perairan daerah yang terkelola	Cakupan Luas Kawasan Konservasi perairan Daerah yang dikelola	790,420	Sumber Data https://sidako.kkp.go.id/sidako
5.	perairan laut yang bebas IUU Fishing	Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	3,45	$\% \text{Penurunan Kasus IUU} = \frac{\text{Jumlah Kasus IUU Fishing tahun sebelumnya} - \text{tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kasus IUU Fishing tahun sebelumnya}} \times 100\%$ Sumber Data : DKP Prov NTT

2.4.2. Perjanjian Kinerja Program (*outcome*)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Unit Kerja Eselon-III dengan target kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (*outcome*). Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran strategis.

Tabel 2.8 Penjabaran Indikator Kinerja Outcome Terhadap Sasaran Strategis dan Target Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Kuantitas	%
1.	Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	790.420 Ha	100
2.	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	205.000 ton	100%
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1.749.600 ton	100%
3.	Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing	Penurunan kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported)	3,45	100%
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan	58 kg/kapita/tahun	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan terdiri dari indikator-indikator berikut:

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefit) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcome);
- e. Dampak (impact) menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak diukur pada periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan dinas.

Cara perhitungan indikator kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dengan melihat kepada kondisi tertentu. Kondisi tersebut, yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pemaknaan dari capaian indikator kinerja dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala dan Kategori Penilaian Capaian Indikator

No.	Skala Nilai	Kategori Penilaian
1.	>90	Sangat Memuaskan
2.	>80 - 90	Memuaskan
3.	>70 - 80	Sangat Baik
4.	>60 - 70	Baik
5.	>50 - 60	Cukup
6.	>30 - 50	Kurang
7.	0 - 30	Sangat Kurang

Setiap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diantaranya membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh rata-rata capaian sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Kondisi Awal (2024)
			Target	Capaian	
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah					
2.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1,1	0,74**	0,42
Sasaran 2: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan					
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Angka	102	91,80**	89,49
3.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Angka	102	100,54**	100,59
Sasaran 3: Meningkatnya status pangan berbasis perikanan					
4.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	(kg/kapita/tahun)	58	51,09**	55,60
Sasaran 4 : Perairan Laut yang bebas IUU Fishing					
5.	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	(%)	3,45	-47,64	6,89
Sasaran 5 : Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola					
6.	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Ha	790.420	823.714,14	701.928,02

Keterangan: ** Data Sementara

3.1.3. Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan atau pencapaian yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk:

- Mendapatkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk penyelenggaraan manajemen yang baik dan benar;
- Mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan progresivitas akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.3 Kategori Pencapaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Kondisi Awal (2024)	Kategori
			Target	Capaian		
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah						
1.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1,1	0,74**	0,42	Baik
Sasaran 2: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan						
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Index	102	91,80**	89,49	Memuaskan
3.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Index	102	100.54**	100.59	Sangat Memuaskan
Sasaran 3: Meningkatnya status pangan berbasis perikanan						
4.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	(kg/kapita/tahun)	58	51,09**	55.60	Memuaskan
Sasaran 4 : Perairan Laut yang bebas IUU Fishing						
5.	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	(%)	3,45	-47,64	9.25	Sangat Kurang
Sasaran 5 : Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola						
6.	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Ha	790.420	823.714,14	701.928,02	Sangat Memuaskan

Keterangan: ** Data Sementara

Penjelasan pencapaian masing-masing sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Tahun 2025, dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Indikator kinerja : Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah					
1.	Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	1.1	0,74**	67.27

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun realisasinya cenderung fluktuatif.

Capaian Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 mendukung sebesar 0,74% Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dukungan program terhadap indikator kinerja dimaksud berasal dari **Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil** sebesar Rp. 10.582.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 6.362.500,- atau 60,13%, **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 939.671.049,- dan terealisasi sebesar Rp. 525.117.978,- atau 85,88%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.316.700,- atau 90,91%.

Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan

Indikator kinerja : - Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan

: - Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 2: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan					
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Index	102	91,80**	90
3.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Index	102	100.54**	98.57

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai di bawah 10%. Angka pemanfaatan potensi laut tersebut didominasi penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, pelagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil. Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan nelayan/pembudidaya. Data sementara NTN Provinsi NTT senilai 91,80 yang berarti kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, membuat pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Sedangkan NTP Provinsi NTT senilai 100,56 dimana kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga pembudidaya mengalami impas. Dukungan program terhadap indikator kinerja dimaksud berasal dari **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap** sebesar Rp. 939.671.049,- dan terealisasi sebesar Rp. 525.117.978,- atau 85,88%. Selain itu, dukungan dari **Program Perikanan Budidaya** dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.316.700,- atau 90,91%.

Sasaran 3 : Meningkatnya status pangan berbasis perikanan

Indikator kinerja : Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 3: Meningkatnya status pangan berbasis perikanan					
4.	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	kg/kapita/tahun	58	51.09**	88.09

****Data Sementara**

Berdasarkan data kinerja tahun 2025, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatatkan realisasi ketersediaan protein hewani berbasis ikan sebesar 51,09 kg/kapita/tahun, yang setara dengan 88,09% dari target yang ditetapkan sebesar 58 kg/kapita/tahun. Meskipun angka realisasi ini menunjukkan tingkat konsumsi yang relatif tinggi dan menegaskan peran vital ikan sebagai sumber protein utama masyarakat, capaian tersebut belum memenuhi target ideal padahal NTT memiliki potensi kelautan yang sangat besar dengan garis pantai mencapai ±5.934,62 km. Kesenjangan antara potensi alam yang melimpah dengan realisasi capaian ini kemungkinan besar disebabkan oleh tantangan distribusi logistik (rantai pendingin) di wilayah kepulauan yang menghambat pemerataan pasokan dari pesisir ke pedalaman, keterbatasan industri pengolahan pasca-panen, serta faktor fluktuasi cuaca yang mempengaruhi produktivitas nelayan.

Sasaran 4 : Perairan Laut yang bebas IUU Fishing

Indikator kinerja : Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 4: Perairan Laut yang bebas IUU Fishing					
5.	Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	%	3,45	-47,64	0

Wilayah perairan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi sumber daya ikan yang besar dan terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yakni WPP-NRI : 573, 713 dan 714. Kondisi ini perlu di jaga agar sumber daya yang tersedia di perairan laut dapat di tingkatkan dan di manfaatkan secara baik. Dinas kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan gelar operasi di laut yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam menjaga kondisi laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2025 tingkat pelanggaran yang di temukan sebesar 60,34% dari total 58 (Lima Puluh Delapan) Kapal Perikanan yang di periksa, di bandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan kasus pelanggaran yang signifikan sebesar 47.67% dimana tahun 2024 di temukan 12.70% pelanggaran dari total 63 (Enam Puluh Tiga) Kapal Perikanan yang di periksa.

Sasaran 5 : Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola

Indikator kinerja : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
Sasaran 5: Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola					
6.	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Ha	790.420	823.714,14	104,21

Kawasan Konservasi yang di kelola oleh daerah provinsi Nusa tenggara Timur memiliki total luas sebesar 823.714,14 Ha yang terdiri dari Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, KKPD Sikka, KKPD Flores Timur dan KKPD Lembata, termasuk pencadangan KKD yang tersebar di Kabupaten Ende dan Nagekeo, Kabupaten Belu, serta Kabupaten Malaka.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Program (output) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
				Target	Realisasi		
Sasaran 1: Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah							
1	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	%	0,42	1,1	0,74**	1,2	0,17**
Sasaran 2: Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan							
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	Nilai	89,49	102	93,04**	104	89,23**
3	Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	Nilai	100.59	102	105,08**	104	101,96**
Sasaran 3: Meningkatnya status pangan berbasis perikanan							
4	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	Kg/kapita/ta hun	55.60	58	51,09**	60	55.60**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2024)
				Target	Realisasi		
Sasaran 4: Perairan Laut yang bebas IUU Fishing							
5	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	%	9,25	3,45	-47,64	0	9,25
Sasaran 5: Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola							
6	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola	Ha	832.785,80	790.420	823.714,14	803.326	701.928,02

Keterangan: ** Data Sementara

Penjelasan pencapaian program/kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil

- ❖ Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Alokasi anggaran sebesar Rp.10.582.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.362.500,- (60,13%).
- Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi: Pagu anggaran sebesar Rp.10.582.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.362.500,- (60,13%).

✚ Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat : Pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.000.000,- (100%). Telah dilaksanakan penyusunan regulasi operasional penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dan telah menghasilkan draf Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan Keuangan serta draf Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini berkolaborasi dengan pihak ketiga yang

- mencakup peningkatan kualitas SDM Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan, sosialisasi regulasi pemanfaatan ruang laut, serta pendampingan teknis penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- ✚ Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pagu anggaran sebesar Rp.2.062.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.562.500,- (75,75%). Telah dilaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT.
 - ✚ Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.500.000,- (33,33%). Telah dilaksanakan program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan capaian sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang telah mendapatkan informasi serta edukasi terkait mitigasi bencana.
 - ✚ Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 5.019.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.300.000 atau 45,82%. Telah dilaksanakan pengawasan dan pendampingan yang menghasilkan peningkatan kepatuhan bagi 40 pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut agar sesuai dengan zonasi dan perizinan yang berlaku guna mendukung investasi berkelanjutan.

2. Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

- ❖ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap: Alokasi anggaran sebesar Rp.939.671.049,- dengan realisasi sebesar Rp. 525.117.978,- (55,88%).
 - Kegiatan Pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 Mil: Pagu anggaran sebesar Rp.6.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.500.000,- (100%).
 - ✚ Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan: Pagu anggaran sebesar Rp.6.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.500.000,- (100%). Capaian output sub kegiatan ini adalah dua dokumen pendataan serta informasi sumber daya ikan (Produksi Perikanan Tangkap).
 - ✚ Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan: Pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,-. Alokasi anggaran tidak

terrealisasi akibat adanya kendala administratif dalam proses pengusulan/penyelesaian dokumen. Upaya penyelesaian masalah dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Pusat (Pusdatin dan DJPT) serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait guna sinkronisasi data statistik perikanan tangkap

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT, Pagu anggaran sebesar Rp. 11.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.499.850,- (91,30%).
 - 📌 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil. Selama tahun 2025, realisasi kegiatan Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal berukuran >5 GT hingga 30 GT dengan wilayah operasional sampai 12 mil telah mencapai 100%. Total rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 291 dokumen, dengan rincian: 209 SIPI, 78 SIUP, dan 4 SIKPI.
- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi: Pagu anggaran sebesar Rp.14.780.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.280.400,- (96,62%).
 - 📌 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT: Pagu anggaran sebesar Rp. 14.780.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.280.400,- (96,62%). Terlaksananya Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT (EBKP) sebanyak 1.800 Rekomendasi.
 - 📌 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT: Pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,00 akan tetapi selama tahun 2025 tidak terdapat realisasi (0%) anggaran pada sub kegiatan tersebut. Telah dilaksanakan Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT sebanyak 1.132 rekomendasi dengan rincian Penerbitan rekomendasi BBM sebanyak 1.030, PPKP 77 dan Rekomendasi pengukuran kapal sebanyak 25 rekomendasi.

- Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi: Pagu anggaran sebesar Rp.906.390.000,- dengan realisasi Rp.493.837.728,- (54,48%). Alokasi anggaran diperuntukkan bagi biaya operasional dan administrasi di empat pelabuhan, yaitu PPI Oeba (Kota Kupang), PPI Tenau (Kota Kupang), PPI Amagarapati (Kabupaten Flores Timur), dan PPI Tulandale (Kabupaten Rote Ndao). Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kegiatan monitoring serta evaluasi sarana dan prasarana perikanan tangkap di berbagai lokasi
 - ✚ Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan: Pagu anggaran sebesar Rp.906.390.000,- dengan realisasi Rp.493.837.728,- (54,48%). Telah dilaksanakan pemenuhan empat layanan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi, peningkatan kapasitas bagi 11 petugas pengelola, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi sarana prasarana perikanan tangkap secara berkala di delapan kabupaten/kota dan koordinasi lintas daerah ke DKI Jakarta.
- ❖ Program Perikanan Budidaya: Alokasi pagu anggaran sebesar Rp.47.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.42.316.700,- (89,27%).
 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi: Pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.000.000,- (66,66%).
 - ✚ Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan: Pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.000.000,- . Telah dilaksanakan kegiatan operasional pengadministrasian penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan.
 - Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (100%).
 - ✚ Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan : Pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- Capaian kegiatan ini meliputi pendataan 45 pelaku usaha perikanan yang telah dinyatakan patuh terhadap peraturan perundang-undangan melalui pemberian rekomendasi.

- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut: Pagu anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.000.000,- (18,51%).
 - + Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi: Pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 500.000,-. Sebanyak 25 orang pelaku usaha budidaya rumput laut telah terdata dan dinyatakan memahami serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - + Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota: Pagu anggaran sebesar Rp.2.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.500.000,-. Telah dilaksanakan pendampingan pengendalian ruang laut melalui verifikasi lapangan terhadap satu unit pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Manggarai.
 - + Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi: Pagu anggaran sebesar Rp.500.000,- dengan realisasi Rp.0,- . Alokasi anggaran tidak terealisasi akibat adanya kendala administratif dalam proses pengusulan/penyelesaian dokumen.
 - + Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota: Pagu anggaran sebesar Rp. 500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,-. Alokasi anggaran tidak terealisasi akibat adanya kendala administratif dalam proses pengusulan/penyelesaian dokumen.
- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat: Alokasi pagu anggaran sebesar Rp.30.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.316.700,- (99,40%).
 - + Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota: Pagu anggaran sebesar Rp.30.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp.30.316.700,- (99,40%). Telah dilaksanakan dukungan operasional pembenihan dan pembesaran di BBIS Noekele, Kabupaten Kupang, melalui penyediaan satu paket bantuan pakan dan obat-obatan.

3. Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU Fishing

- ❖ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Alokasi pagu anggaran sebesar Rp.129.977.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.757.700,- (62,90%).
 - Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil : Alokasi pagu anggaran sebesar Rp.127.707.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.81.257.700,- (63,62%).
 - ✚ Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi: Pagu anggaran Rp. 1.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.000.000,- (66,66%) dengan output terlaksananya penanganan 3 (tiga) perkara sanksi administratif di Kota Kupang.
 - ✚ Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Pagu anggaran sebesar Rp. 3.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 715.000,- (47,66%). Telah dilaksanakan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi dua personel di Kabupaten Alor, yang diintegrasikan melalui kegiatan pengenalan hewan laut Alor
 - ✚ Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan: Pagu anggaran Rp. 29.505.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.015.000,- (23,77%). Terlaksananya gelar operasi dilaksanakan selama 16 hari, dengan rincian 15 hari di UPTD dan satu hari di Cabang Dinas Wilayah II.
 - ✚ Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan: Pagu anggaran Rp. 70.270.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 53.995.300,- (76,83%). Telah dilaksanakan perawatan terhadap tiga unit kapal pengawas kelautan dan perikanan yang berlokasi di Cabang Dinas Wilayah II (Kabupaten Flores Timur), UPTD (Kabupaten Alor), dan Kota Kupang.
 - ✚ Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi: Pagu anggaran sebesar Rp.3.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.700.000,- (84,37%). Telah dilaksanakan pengawasan usaha pelaku usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di laut sebanyak 15 pelaku usaha di Kabupaten Alor dan Kabupaten Manggarai.
 - ✚ Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi dengan pagu anggaran Rp. 1.900.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.400.000,- (73,68%). Terlaksananya

pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sebanyak 5 pelaku usaha di Kabupaten Alor.

✚ Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi dengan pagu anggaran Rp. 8.800.000,- dan realisasi anggaran Rp. 6.300.000,- (71,59%). Telah dilaksanakan gelar operasi terhadap lima pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dengan rincian: dua pelaku usaha di Wilayah V (PT TOM dan PT Cendana Indopearls), satu pelaku usaha di Wilayah I, dan dua pelaku usaha di bawah naungan UPTD Kabupaten Alor.

✚ Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS): Pagu anggaran sebesar Rp.9.332.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.132.000 (87,14%). Telah dilaksanakan pengembangan terhadap 34 Pokmaswas yang tersebar di beberapa wilayah, meliputi Kota Kupang (Pokmaswas Oesapa, Koral, dan Bahari), Kabupaten Alor (Kelurahan Kabola, Desa Ternate, Alor Besar, Buaya, dan Pura), serta 23 kelompok di bawah koordinasi Cabang Dinas Wilayah I dan Cabang Dinas Wilayah IV."

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi: Pagu anggaran Rp2.269.700,- dan realisasi anggaran Rp500.000,- (22,02%).

✚ Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi: Pagu anggaran Rp2.269.700,- dan realisasi anggaran Rp500.000,- (22,02%). Terlaksananya kegiatan pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan sebanyak 2 Pelaku Usaha di UPTD Alor.

4. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan

❖ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan : Pagu anggaran sebesar Rp1.101.946.800,- dengan realisasi anggaran Rp918.026.820,- (83,30%).

- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp1.101.946.800,- dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp918.026.820,- (83,30%).

✚ Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam

rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing. Adapun pagu anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp1.100.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp917.026.820,- (83,36%). Capaian dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya 12 (dua belas) kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kampanye GEMARIKAN : Terlaksananya kampanye GEMARIKAN yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Kampanye GEMARIKAN Kota Kupang

Tahap I: Dilaksanakan pada 23 Agustus 2025 di Rumah Pohon, Kompleks Kantor Gubernur NTT. Sebanyak 300 paket produk olahan dan ikan beku didistribusikan kepada TK Pertiwi (30 orang), TK Negeri Pembina (110 orang), SD Negeri Naikoten 2 (65 orang), dan SD Muhammadiyah 2 (95 orang).

Tahap II: Dilaksanakan pada 12 September 2025 di Halaman Kantor PKK Provinsi NTT. Sebanyak 300 paket diberikan kepada TK Aisyiyah III (75 orang), Posyandu ILP Kenari Naikoten (48 orang), UPTD SD Negeri Naikoten 1 (121 orang), dan UPTD SD Negeri Bertingkat Naikoten (56 orang).

- b) Kampanye GEMARIKAN Kabupaten Kupang

Tahap I: Dilaksanakan pada 26 Agustus 2025 di Gereja Elim Bolok. Sebanyak 300 paket didistribusikan kepada TK Elim Bolok (57 orang), SD Negeri Uihani (122 orang), dan SD GMIT Bolok (121 orang).

Tahap II: Dilaksanakan pada 4 Oktober 2025 di Halaman Gereja GMIT Tuatuka. Sebanyak 300 paket dibagikan kepada siswa SD Inpres Oesao (42 orang), SD GMIT I Oesao (27 orang), SD GMIT II Oesao (30 orang), SD Inpres Kayu Putih (25 orang), PAUD Anak Bangsa (17 orang), PAUD Kasih Karunia (18 orang), Emanuel Oesao (23 orang), SD GMIT Tuatuka (26 orang), dan Posyandu Tuatuka (92 orang).

- c) Kampanye GEMARIKAN Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)

Tahap I: Dilaksanakan pada 6 Oktober 2025 di Halaman Gereja GMT Efata Soe. Sebanyak 300 paket diberikan kepada SD Inpres Sekip (99 orang), PAUD Terpadu Betania Soe (29 orang), PAUD/RA Aisyiyah Soe (39 orang), TK Kristen Betania Soe (29 orang), TK Harapan Sekip (12 orang), dan Posyandu Taubneno (99 orang).

Tahap II: Dilaksanakan pada 31 Oktober 2025 di MI Nurul Huda Soe. Sebanyak 300 paket didistribusikan seluruhnya kepada siswa MI Nurul Huda (300 orang).

2) Pelatihan Pengolahan Ikan dalam mendukung program GEMARIKAN (Stunting, Kemiskinan, dan OVOP) telah dilaksanakan bagi 40 kelompok yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Rincian sebarannya meliputi: Kota Kupang (8 kelompok), Kabupaten Kupang dan TTS (masing-masing 5 kelompok), Kabupaten TTU (4 kelompok), serta Kabupaten Belu, Malaka, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Flores Timur, dan Alor masing-masing sebanyak 3 kelompok. Dalam kegiatan ini, diserahkan pula bantuan peralatan pengolahan berupa *Cooler Box Chest Freezer* (300 Liter, tipe PCF 317), mesin vakum otomatis (tipe DZ-290A Powerpack), serta paket plastik vakum ukuran 17 x 25 cm (50 lembar).

 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp1.946.800,- dan realisasi anggaran Rp1.000.000,- (51,36%). Capaian dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang merupakan bagian dari proses pembinaan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan baik dalam kegiatan ekspor maupun impor produk perikanan serta merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin keamanan pangan untuk masyarakat yang mengkonsumsi produk perikanan. Selama tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT telah mengeluarkan 46 rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Selain itu, capaian lain dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu pelayanan dan pembinaan SKP yang dilakukan terhadap 18 (delapan belas) Unit Pengolah Ikan (UPI).

3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Anggaran

Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami beberapa kali refocusing yang berdampak pada efisiensi anggaran program/ kegiatan pada tahun 2024. Efisiensi anggaran secara langsung berdampak pada pencapaian kinerja dari program/ kegiatan yang mendukung IKU. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebesar Rp. 55.958.303.600,- (lima puluh lima miliar Sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 22.170.815.487,- (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) realisasi keuangan TA. 2025 sebesar Rp 18.913.798.556,- (delapan belas miliar Sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) mencapai 85,30%. **Anggaran yang tidak dapat terserap sebesar Rp 3.257.016.931,- atau 0,17% dari total alokasi APBD.** Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk selisih realisasi pada belanja pegawai, serta adanya kegiatan prioritas yang lebih diutamakan pelaksanaannya. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak terealisasi juga dipengaruhi oleh keterlambatan dalam proses administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana.

b. Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, Cabang Dinas dan seluruh instalasi dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan Per 08 Januari 2026 sebanyak 210 orang yang terdiri dari 137 Laki-Laki dan 73 Perempuan. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam jumlah personil dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, Dinas mengambil langkah-langkah strategis dengan mengoptimalkan peran Kantor Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai perpanjangan tangan operasional. Distribusi pegawai dilakukan secara cermat dan proporsional, dengan tujuan utama mengamankan dan mensukseskan pelaksanaan program-program strategis yang menjadi prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

c. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan program selama tahun 2025 secara umum berjalan sesuai dengan jadwal (on schedule). Namun, terdapat beberapa penyesuaian waktu pada kegiatan pengawasan akibat kondisi cuaca (faktor alam), yang disiasati dengan pengalihan fokus pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan kelompok nelayan.

d. Sarana dan Prasarana Penunjang

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk operasional penunjang di setiap Cabang Dinas, memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan dinas dalam menjangkau lokus dan titik-titik sentra kelautan dan perikanan. Hal ini secara langsung berkorelasi dengan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dinas, serta berdampak pada capaian kinerja secara keseluruhan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dengan berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung melalui APBD sebesar Rp. 55.958.303.600,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 22.170.815.487,- realisasi keuangan TA. 2025 sebesar Rp 18.913.798.556,- mencapai 85,30%. Pagu ini untuk membiayai 6 (enam) Program dengan 24 (dua puluh empat) Kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) Sub Kegiatan.

Tabel 3.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.046.198.032	19.941.238.138	17.340.216.858	86.96	100
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.549.000	132.392.500	114.766.000	86.69	100

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.932.014.000	15.305.826.426	13.251.104.832	86.58	100
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	693.000	692.850	99.98	100
1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	0
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	50.000.000	0	0	0
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.102.432	79.948.032	66.570.895	83.27	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	131.600.000	18.455.000	17.614.500	95.45	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.940.451.600	4.124.337.680	3.656.070.812	88.65	100
1.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.143.000	259.585.500	214.332.969	82.57	100
1.14	Fasilitasi Keprotokolan	-	20.000.000	19.064.000	95.32	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	430.697.568	10.582.000	6.362.500	60.13	100
2.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	415.697.568	10.582.000	6.362.500	60.13	100
2.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000	0	0	0	0

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	31.374.903.000	939.671.049	525.117.978	55.88	100
3.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	99.807.000	6.500.000	6.500.000	100	100
3.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000	0	0	0	0
3.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	120.223.000	11.500.000	10.499.850	91.30	100
3.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	69.373.000	14.780.400	14.280.400	96.62	100
3.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	31.085.000.000	906.390.649	493.837.728	54.48	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	85.000.000	47.400.000	42.316.700	89.28	100

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
4.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.500.000	1.500.000	1.000.000	66.67	100
4.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	21.000.000	10.000.000	10.000.000	100	100
4.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	194.260.000	5.400.000	1.000.000	18.52	100
4.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	30.000.000	30.500.000	30.316.700	99.40	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	751.083.000	129.977.500	81.757.700	62.90	100
5.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	673.363.000	127.707.800	81.257.700	63.63	100
5.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	77.720.000	2.269.700	500.000	0.02	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	(Satu) Daerah Provinsi					
06	PROGRAM PENGOLAHANDAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	91.000.000	1.101.946.800	918.026.820	100	100
6.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikananbagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	91.000.000	1.101.946.800	918.026.820	83.31	100

3.2.2. Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000. Realisasi Per 31 Desember Tahun 2025 mencapai 96,33% atau Rp. 9.740.817.656,- dengan rincian pendapatan sebagaimana dibawah ini:

Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi	%
1	2	4	5
A. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	750.000.000	658.190.000	87.75
1). Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	750.000.000	658.190.000	87.75
B. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	1.031.407.600	714.746.129	69.29

1). Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	1.031.407.600	714.746.129	69,29
C. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Produksi Usaha Daerah	1.763.592.400	2.678.027.500	151,85
1). Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Produksi Usaha Daerah	1.763.592.400	2.678.027.500	151,85
D. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.475.000.000	3.693.307.255	82,53
1). Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	4.475.000.000	3.693.307.255	82,53
E. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.980.000.000	1.996.546.771	100,83
1). Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Produksi Usaha Daerah	1.980.000.000	1.996.546.771	100,83
Total	10.000.000.000	9.740.817.656	97,40

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2025 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan triwulan berikutnya, juga dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 55.958.303.600,- (lima puluh lima miliar Sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah) dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp 22.170.815.487,- (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) realisasi keuangan TA. 2025 sebesar Rp 18.913.798.556,- (delapan belas miliar Sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) mencapai 85,30%. Secara umum capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 berkategori baik yang terdiri dari 5 indikator sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 3 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target;
2. Terdapat 2 indikator capaian kinerja utama yang melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 4 indikator capaian kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target.

Indikator capaian kinerja sasaran strategis yang masih perlu ditingkatkan capaiannya yaitu:

1. Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
2. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan;
3. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan.

Sedangkan capaian kinerja utama yang masih perlu ditingkatkan capaiannya yaitu:

1. Persentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
2. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan;

3. Nilai Tukar Pembudidaya (NTN) sektor perikanan;
4. Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan;

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas capaian kinerja Tahun 2025, maka dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2024-2026, disarankan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Pemberdayaan dan Modernisasi Teknologi: Melakukan peningkatan bantuan pemerintah dan pembinaan teknis secara berkelanjutan bagi nelayan, pembudidaya, serta pengolah produk perikanan untuk mengatasi rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya ikan;
2. Perluasan Akses Pasar dan Investasi: Mengupayakan perluasan akses pasar, promosi, dan investasi, khususnya untuk mendorong ekspor produk perikanan guna meningkatkan harga jual ikan yang selama ini masih didominasi penjualan domestik;
3. Optimalisasi Pengawasan Sumber Daya (IUU Fishing): Meningkatkan frekuensi pengawasan di wilayah perairan hingga 12 mil, memperkuat koordinasi dengan POKMASWAS di 22 Kabupaten/Kota, serta melengkapi sarana prasarana pengawasan untuk menekan angka pelanggaran Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing;
4. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan dan Penanganan Stunting: Memperluas jangkauan distribusi ikan ke daerah pelosok dan mengintensifkan sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sebagai kontribusi sektor perikanan dalam penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Timur;
5. Pengembangan Budidaya Rumput Laut dan Bibit Unggul: Meningkatkan pemanfaatan potensi lahan budidaya, khususnya rumput laut, melalui penyediaan kebun bibit unggul yang dihasilkan dari seleksi varietas dan kultur jaringan;
6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Administrasi: Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, termasuk percepatan proses perizinan usaha perikanan dan pengelolaan ruang laut untuk mendukung implementasi ekonomi biru di wilayah Nusa Tenggara Timur;
7. Optimalisasi Capaian PAD: Melakukan evaluasi berkala terhadap strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Akhirnya pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dan cita-cita walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu kerja keras untuk dibenahi.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**

Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Mei 2025

Pihak Kedua,

E. Melkiades Laka Lena

Pihak Pertama,

Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Peresentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah (%)	1,1
2.	Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	102
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) sektor perikanan	102
3.	Meningkatnya status pangan berbasis perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan (Kg/kapita/tahun)	52
4.	Perairan Laut yang bebas IUU Fishing	Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing) (%)	3,45
5.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (Ha)	790.420

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp.	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 21.482.881.882,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp. 10.582.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 66.259.468,-	Realisasi minimal 85%
	4. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 16.900.000,-	Realisasi minimal 85%
	5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 42.216.700,-	Realisasi minimal 85%
	6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.946.800,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. 10.000.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja (APBD)	Rp. 21.620.786.850,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi		
	1.	Rp. -	
b.	Program Tugas Pembantuan		
	1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (TP-Satker 249169)	Rp. 17.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. 17.000.000,-	Realisasi minimal 90%

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember tahun 2025;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

3. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

4. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

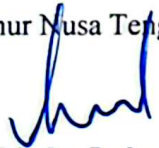
K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang di-upload) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Gubernur Nusa Tenggara Timur



E. Melkiades Laka Lena

Kupang, Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi., M.Si

LAMPIRAN VERIFIKASI LEVEL 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2025

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Verifikator : Kepala Dinas

Lembar Koreksi :

1. Tambahkan Narasi Kegiatan Insentif Fiskal lengkap dengan Dokumentasinya
2. Koordinasikan hasil Kegiatan di Bidang dan Cabang Dinas serta UPTD sesuaikan dengan Laporan Tahunan

Kupang, Februari 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sulastris H. I. Rasylid, S.Pi, M.Si
NIP. 19701019 199903 2 004

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

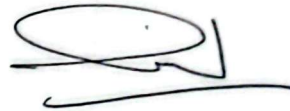
Verifikator : Sekretaris

Lembar Koreksi :

1. Sesuaikan hasil capaian kinerja dengan target pada Perjanjian Kinerja (PK) 2025
2. Tambahkan dokumentasi kegiatan pada bagian lampiran dari Bidang, Cabang Dinas dan UPTD
3. Sesuaikan Sumber Daya Aset Dinas
4. Perhatikan Anggaran dan Realisasi sesuaikan dengan SPJ Fungsional

Kupang, Februari 2026

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Stefania T. Boro, S.Pi, MM
NIP. 19730714 199803 2 011

LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Verifikator	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Lembar Koreksi	:	1. Perhatikan kembali Sumber Daya Manusia sesuaikan dengan SOTK periode akhir 2025 2. Sesuaikan kembali nomenklatur UPTD Pengelola Taman Periaran Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sesuaikan dengan SOTK

Kupang, Februari 2026
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Adolfince A. Mozes, S.Pi, M.Si
NIP. 19830823 201001 2 019

**LAMPIRAN REKAPAN KEGIATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

REKAPAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT 2025



Gambar 1. Kegiatan Kampanye Gemarikan Kota Kupang Tahap I Pada Tanggal 23 Agustus 2025 Bertempat Di Rumah Pohon Kompleks Kantor Gubernur NTT



Gambar 2. Kegiatan Kampanye Gemarikan Kabupaten Kupang Tahap I Pada Tanggal 26 Agustus 2025 Bertempat Di Gereja Elim Bolok



Gambar 3. Kegiatan Kampanye Gemarikan Kota Kupang Tahap Ii Pada Tanggal 12 September 2025
Bertempat Di Halaman Kantor Pkk Provinsi NTT



Gambar 4. Kegiatan Kampanye Gemarikan Kabupaten Kupang Tahap II Pada Tanggal 04 Oktober 2025
Bertempat Di Halaman Gereja Gmit Tuatuka



Gambar 5. Kegiatan Kampanye Gemarikan Kabupaten TTS Tahap I Pada Tanggal 06 Oktober 2025
Bertempat Di Halaman Gereja Gmit Efata Soe



Gambar 6 Kegiatan Kampanye Gemarikan Kabupaten TTS Tahap Ii Pada Tanggal 31 Oktober 2025
Bertempat Di Sekolah Mi Nurul Huda Soe



Gambar 7. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan, Dan OVOP) Kelompok Kota Kupang Dan Kabupaten Kupang Pada Tanggal 07 - 09 Oktober 2025 Bertempat Di BPSDMD Provinsi NTT



Gambar 8. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan, Dan OVOP) Kelompok Kota Kupang Dan Kabupaten Kupang Pada Tanggal 07 - 09 Oktober 2025 Bertempat Di BPSDMD Provinsi NTT



Gambar 9. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan, Dan OVOP) Kelompok Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Pada Tanggal 16 - 18 Oktober 2025 Bertempat Di BPSDMD Provinsi NTT



Gambar 10. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan, Dan OVOP)
Kelompok Kabupaten Manggarai Timur Pada Tanggal 03 - 05 November 2025
Bertempat Di Hotel Gloria Borong Manggarai Timur



Gambar 11. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan, Dan OVOP)
Kelompok Kabupaten Sumba Barat Daya Pada Tanggal 06 - 08 November 2025
Bertempat Di Hotel Sumba Sejahtera Tambolaka Sumba Barat Daya



Gambar 12. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan, Dan OVOP)
 Kelompok Kabupaten Flores Timur Pada Tanggal 07 - 08 November 2025
 Bertempat Di Rusun Keuskupan Larantuka Flores Timur



Gambar 13. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Untuk Mendukung Gemar Ikan (Stunting, Kemiskinan, Dan OVOP)
Kelompok Kabupaten Alor Pada Tanggal 13 - 14 November 2025
Bertempat Di Hotel Melati Kalabahi Alor



Gambar 14. Penyerahan Paket Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan di Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Flores Timur, dan Kab. Alor



Gambar 15. Kegiatan Pra SKP dan Pembinaan SKP 2025



Gambar 16. Penyusunan dokumen kawasan konservasi perairan daerah Belu meliputi kegiatan konsultasi publik tingkat Kabupaten dan Provinsi



Gambar 17. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar (Pembelian Pakan Ikan BBIS Noekele Tahun Anggaran 2025)



Gambar 18. Pendampingan Pengendalian Ruang Laut Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut



Gambar 19. Sosialisasi dan Pembinaan CBIB Pembudidaya



Gambar 20. Koordinasi terkait Rancangan Peraturan Gubernur terkait BLUD UPTD Pengelolaan Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Jakarta



Gambar 21. Konsultasi Publik II Rancangan Pergub NTT Dalam Mendukung Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya



Gambar 22. Penyerahan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Direktorat Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan di Surabaya



Gambar 23. Pendampingan teknis penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya



Gambar 24. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan PPI Oeba



Gambar 24. Kegiatan Bimtek Sertifikasi Nelayan - KCD Wilayah II



Gambar 25. Penyerahan Kapal dan Barang Bukti oleh Polairud ke KCD (Penyitaan Kompresor) - KCD Wilayah II



Gambar 26. Workshop membangun kolaborasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Flores Timur – KCD Wilayah II



Gambar 27. Kunjungan Wakil Gubernur NTT di PPI Amagarapati – KCD Wilayah II



Gambar 28. Pemantauan pengiriman ikan antar pulau dari Pelabuhan Deri menuju Kupang– KCD Wilayah II



Gambar 29. Kegiatan kunjungan kerja Gubernur NTT di Larantuka dan Maumere– KCD Wilayah II



Gambar 30. Rapat kepanitiaan kegiatan pameran pembangunan dan festival umkm di Larantuka– KCD Wilayah II



Gambar 31. Pembukaan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Festival UMKM menyongsong HUT NTT ke 67– KCD Wilayah II



Gambar 32. Koordinasi dengan Kepala Desa Tadho Tengan Kec. Riung Kab. Ngada, Penyuluh Perikanan Kab. Ngada Melakukan Sosialisasi PERUB Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Pajak Retribusi Daerah– KCD Wilayah III



Gambar 33. Menyerahkan Pas Kecil dan Buku Kapal Kepada Nelayan – KCD Wilayah III



Gambar 34. Diskusi bermasa Kelompok Nelayan Penangkap Gurita, KSOP Ende, KCD Wilayah III, Yayasan Tananua Flores, Tokoh Masyarakat tentang Lokasi Penangkapan Gurita di Wilayah Perairan Kawasan Pelabuhan IPPI Ende– KCD Wilayah III



Gambar 35. Pengawasan olah Gerak Kapal Perikanan Di Pesisir Pantai Tonggo Kecamatan Nangaroro– KCD Wilayah III



Gambar 36. Melayani Konsultasi Pengurusan, Penginputan, Verifikasi, Pengarsipan, Penyerahan Izin Kapal Perikanan E-BKP, SIUP dan SIPI– KCD Wilayah IV



Gambar 37. Penanaman Mangrove dan Transplantasi Terumbu Karang Yang Diinisiasi oleh PT. Telkom Indonesia, Berlokasi di Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kab. Manggarai Barat– KCD Wilayah IV



Gambar 38. Pertemuan Regular Tindak Lanjut Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Manggarai Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan WWF Indonesia – KCD Wilayah IV



Gambar 39. Mendampingi Kunjungan Kerja dan Menghadiri Pengarahan Bapak Gubernur NTT– KCD Wilayah IV



Gambar 40. Mengikuti Patroli Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan TNP Laut Sawu dan Pemantauan Zonasi Bersama Tim BKKPN Kupang– KCD Wilayah IV



Gambar 41 Monitoring Rehabilitasi Mangrove di Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat – KCD Wilayah IV



Gambar 42. Serah Terima Berkas Perkara Pengrusakan Terumbu Karang oleh KM. APIK dari Satpolairud POLRES Manggarai Barat ke Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wil. IV – KCD Wilayah IV



Gambar 43. Pemantauan Unit Usaha Budidaya Lele System Bioflok Pokdakan Inovasi Sejahtera Sernaru, Kabupaten Manggarai Barat – KCD Wilayah IV



Gambar 44. Penyerahan peralihan TDKP ke E-BKP – KCD Wilayah V



Gambar 45. Monitoring dan pengawasan produksi Chips rumput laut ATCC dan ATSC – KCD Wilayah V



Gambar 46. Pengawasan dan sosialisasi Biota dilindungi pada nelayan Sumba Timur bersama BKKPN Kupang Wilker Sumba– KCD Wilayah V



Gambar 47. Identifikasi Mangrove di Desa Tapil, Kecamatan Rindi dan Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur– KCD Wilayah V



Gambar 48. Pemantauan Biota dilindungi (Penyu) di Desa Napu bersama BKKPN Kupang – KCD Wilayah V



Gambar 49. Pegawai KCD Wilayah V dalam mengikuti BIMTEK Kesyahbandaran– KCD Wilayah V

